



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No.2, 2022

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Indah Mayang Sari¹, Laylan Syafina²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

indahmayangs25@gmail.com¹, laylansyafina@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Regional Government Information System is an information system used in the Regional Revenue Management Agency for South Labuhanbatu Regency in managing regional finances. However, the implementation of Regional Government Information System at BPPD South Labuhanbatu Regency has not been implemented properly because the quality of the system is still lacking, in addition, the lack of training and technical guidance for SKPD has resulted in many SKPD who are not accustomed to using the local government information system. The purpose of this study was to determine how the implementation of Regional Government Information System in BPPD South Labuhanbatu Regency. The theory used is the theory of implementation according to Van Metter and Van Horn. Descriptive research method using a qualitative approach is the method used in this study.

Keywords : *Implemented, Regional Government Information System*

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengelola keuangan daerah. Namun implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, selain itu kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi SKPD, mengakibatkan banyak SKPD yang belum terbiasa menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pergantian zaman mengakibatkan kemajuan teknologi dan informasi mengalami peningkatan. Memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan program pembangunan untuk menyampaikan informasi secara sempurna dan meluas menjadi tujuan bagi pemerintahan daerah. Dalam sebuah organisasi, sangat membutuhkan suatu sistem informasi yang mana perkembangannya sangat pesat. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah memadukan sistem perencanaan dengan sistem anggaran pemerintah daerah, yang bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada beberapa peraturan pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan aturan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, seperti PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi pembuatan data dan sistem informasi dalam pemerintahan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah berlandas teknologi dalam menciptakan data yang terorganisir dalam suatu daerah. Sistem Informasi Kota (SIPD) juga berfungsi sebagai sistem pendataan yang cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk perencanaan program dan evaluasi daerah secara wajar, efektif dan efisien.

Penerapan aplikasi web ini dimaksudkan untuk memudahkan prediksi dan evaluasi pelayanan publik khususnya pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penggunaan aplikasi ini tentunya tidak mudah karena membutuhkan kerjasama semua pihak terkait. Berdasarkan pengamatan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebelumnya BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan SIMDA dan tidak terdapat permasalahan dalam penggunaannya, namun karena adanya transisi ke sistem baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun 2021, semua pemerintah daerah harus menerapkan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Aplikasi tersebut sudah digunakan oleh BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun penerapannya masih hanya digunakan di beberapa bagian atau dalam artian penggunaannya belum lengkap. Kendala yang dihadapi beberapa OPD khususnya BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu terhambatnya perputaran anggaran dan sistem penggajian, kemudian jaringan SIPD yang sering error mengakibatkan terjadinya penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan realisasi dari suatu rancangan yang telah ditata secara rinci. Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*implement*” yang berarti melaksanakan. Implementasi biasanya dilaksanakan jika suatu rencana dianggap selesai. Implementasi adalah perpanjangan dari kegiatan yang mengkoordinasikan prosedur hubungan antara sasaran dan langkah-langkah untuk memperolehnya, dan membutuhkan jaringan praktisi administrasi yang efektif. (Setiawan, 2004). Suatu aktivitas, operasi, atau mekanisme sistem dibuat sebagai hasil dari implementasi. Implementasi bukan sekedar kegiatan; itu adalah kegiatan terstruktur dengan baik yang memungkinkan kegiatan ini direalisasikan (Prafitasari, 2016).

Dari beberapa pendapat ahli dapat diartikan bahwa implementasi merupakan aktivitas yang direncanakan, yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan mengacu pada peraturan

khusus dalam rangka memenuhi maksud dari suatu kegiatan. Model Implementasi Kebijakan dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai model implementasi kebijakan. Proses implementasi ini merupakan kerangka kerja strategis atau kinerja yang terutama dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai implementasi kebijakan yang terjadi dalam konteks berbagai variabel. Model ini berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan mengikuti garis lurus dari perumusan kebijakan ke implementasi kebijakan publik. Model ini mengidentifikasi kebijakan yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berhubungan, antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Sistem Informasi

Suatu sistem secara umum terdiri atas input, proses, dan output. Masukan (input) yang termasuk dalam kategori sistem oleh unit input, selanjutnya diproses oleh unit pemroses, dan merupakan keluaran. Sistem informasi adalah sekumpulan informasi yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling terikat dan terkait satu sama lain. Hubungan ini merupakan hubungan antara arus informasi yang mewakili tingkat sistem organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak.

Menurut (Hutahean, 2018) Sistem informasi adalah sistem dalam organisasi yang melengkapi keperluan manajemen transaksi secara umum, mendukung aktivitas, mewakili manajemen organisasi dan kegiatan strategis, dan menyajikan laporan yang dibutuhkan kepada pihak eksternal. Tujuan dari sistem informasi yaitu untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Menurut (Nasution & Nurwani, 2021) Data yang hanya di olah saja tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai informasi. Agar bermanfaat, informasi perlu didukung oleh tiga pilar: langsung atau relevan dengan seseorang (*relevance*), tepat waktu, dan benar atau akurat (*accurate*).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) mengubah data keuangan dan lainnya menjadi informasi dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan internal. Sistem informasi akuntansi yang tepat, akurat dan cepat dapat mengembangkan perusahaan dengan sehat dan cepat.

Sistem Informasi Pemerintah merupakan sumber daya yang harus ditata dan dikelola dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cakupan yang sangat kompleks. Pemanfaatan teknologi tidak terbatas hanya untuk bidang industry saja tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Kegiatan di pemerintahan sangat erat kaitannya dengan administrative yang jelas berhubungan dengan data-data. Dengan memanfaatkan teknologi maka data informative tersebut dapat lebih terorganisir, mudah diakses dan digunakan secara maksimal guna menghasilkan kebijakan yang mendukung masyarakat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem untuk mengelola data pembangunan daerah, data keuangan daerah, dan data penting pemerintah daerah lainnya untuk pembangunan daerah. SIPD juga merupakan jaringan yang menghimpun data secara terpadu di tingkat daerah dan nasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat perencanaan dan penilaian pembangunan daerah (Karundeng, Afrilia Bella, et, 2021).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi pemerintah daerah yaitu penerapan transparansi informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Transparansi

Informasi Publik No. 14 yang menjamin bahwa warga negara memiliki akses terhadap informasi publik. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah) dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan pengelolaan informasi daerah secara profesional dalam SIPD. Pemerintah juga mendorong untuk melakukan inovasi rencana pembangunan dengan membuka informasi kepada publik yang merupakan isu strategis pembangunan, serta persyaratan proses perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara bersamaan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang merinci teknis pengelolaan SIPD sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah terkait lainnya yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. SIPD adalah sistem yang menyimpan, mengelola, dan mentransformasikan data pembangunan daerah menjadi informasi yang tersedia untuk umum bagi pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa sistem informasi pemerintah daerah harus dapat mendukung arsitektur SPBE (Sistem Pemerintah Elektronik) yang terintegrasi secara nasional sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan kemudahan terdiri atas sistem perencanaan hingga sistem penganggaran. SIPD Pemerintah daerah dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

1. Informasi Pembangunan Daerah

Melalui kerjasama pemangku kepentingan penting, SIPD dapat mengelola data dan informasi terkait rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana strategis daerah (RENSTRA PD), rencana kerja daerah (RENJA PD), dan pelaksanaan pembangunan daerah semuanya contoh SIPD. Kemudahan memperoleh data dan informasi tentang rencana pembangunan daerah menjadi dasar pemutakhiran data dan informasi.

2. Informasi Keuangan Daerah.

SIPD dapat memperoleh data keuangan daerah secara rinci melalui pemangku kepentingan yang terhubung dengan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan. Proses pengelolaan keuangan daerah yang relevan yaitu:

- a) Perencanaan anggaran daerah;
- b) Pelaksanaan dan pengelolaan dana daerah;
- c) Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d) Pertanggungjawaban keuangan daerah;
- e) Tanggung jawab properti lokal; dan
- f) Informasi keuangan daerah lainnya.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

Informasi tata kelola yang luas lainnya tersedia dari SIPD. Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang ditangani oleh pemangku kepentingan terkait adalah contoh dari informasi umum.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian dalam memahami fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan lain-lain, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam setting alam tertentu secara keseluruhan (Moleong, 2006). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka, jurnal, buku, dll sebagai bahan penunjang untuk hasil penelitian yang lebih baik. Kegiatan penelitian ini dimulai pada tahap pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan kepala sub bagian program, dimana narasumber berperan langsung dalam menggunakan aplikasi SIPD dan observasi atau observasi langsung. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis data dan menafsirkannya dengan kalimat, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat cocok diterapkan karena dapat mendorong terselenggaranya informasi yang efektif, inovatif dan berkualitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah sangat berharap kepada SKPD untuk menerapkan sistem ini, namun pada kenyataannya masih banyak kendala di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, peneliti memakai teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu:

1. Standard dan sasaran kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, mengukur kemampuan implementasi kebijakan memerlukan kriteria dan tujuan khusus yang harus dipenuhi oleh pelaksana kebijakan. Evaluasi kebijakan dan tujuan ini dikenal sebagai kinerja kebijakan. Berdasarkan penelitian, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk menerapkan kebijakan yang dibutuhkan dalam menjalankan program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tetapi, karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah program baru, maka menghadapi banyak tantangan selama instalasi. Namun, seiring berjalannya waktu kekurangan pada sistem ini akan diatasi, dan tujuan aplikasi akan terwujud.

2. Sumber daya

Penggunaan sumber daya sangat penting dalam pelaksanaan SIPD. Tercapai atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan waktu merupakan faktor utama untuk menentukan tercapainya implementasi kebijakan. Keberhasilan program harus didukung oleh sumber daya yang memadai. Meski mayoritas operator sistem masih berusia muda, namun penelitian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyimpulkan bahwa departemen sumber daya manusia telah memenuhi dan memenuhi komitmen dan tanggung jawabnya. Kemungkinan dan kapasitas untuk mengoperasikan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal sumber daya sarana dan prasarana, di sisi lain sistem informasi berbasis web memiliki akses ke jaringan WiFi, komputer, dan perangkat pendukung lainnya, memungkinkan Sistem Manajemen Pendapatan Daerah beroperasi dengan baik.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Badan pelaksana memusatkan upaya mereka pada kelompok formal dan informal yang tergabung dalam implementasi kebijakan. Hal ini signifikan sebab lembaga dan lembaga penegak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penegakan. Hal yang diperlukan untuk menyusun program kegiatan yaitu keberhasilan program kegiatan juga dibantu oleh koordinasi yang jelas dan konsisten. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal ini BPPD bertugas melaksanakan sistem informasi pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah. Sistem pemerintahan daerah, tata kelola, dan sistem pengawasan, misalnya, semua harus terkoneksi dengan baik.

4. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi digunakan untuk memastikan bahwa hubungan antara dua atau lebih lembaga dipertahankan dan bahwa tujuan yang disepakati bersama terpenuhi. Realisasi implementasi sistem informasi pemerintah daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengetahui berbagai komunikasi antara kelompok kebijakan dan kelompok sasaran dalam terwujudnya informasi berdasarkan tiga faktor yaitu hak masyarakat, ketepatan waktu, dan nilai hak, dan untuk mencapai segala sesuatu yang diperlukan untuk semua perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mewujudkannya. Terlepas dari banyaknya hambatan dalam penerapan sistem ini yang menyebabkan keterlambatan dalam proses perekrutan, sistem ini mengharuskan pemerintah pusat untuk menyempurnakan dan menghilangkan hambatan yang dapat menimbulkan banyak sanggahan. Akibatnya, komunikasi merupakan hal utama agar sistem dapat diperbaiki dengan efektif.

5. Disposisi dan sikap para pelaksana

Karakter pembuat kebijakan yang baik merupakan salah satu keberhasilan program. Seorang praktisi dengan sikap yang tulus dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban tertentu memiliki banyak potensi untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah. Tentu saja, ada banyak masalah dan hambatan di jalan keberhasilan perencanaan pembangunan dan penerapan kebijakan yang disepakati bersama, tetapi masih ada penundaan dalam proses penelitian yang menghasilkan masalah manajemen. Karena sistem belum siap diterapkan segera, proses GU dan TU belum siap tahun ini, dan proses anggaran ditunda. Oleh karena itu, pemerintah pusat sebagai pembangun sistem dan otoritas pengatur kebutuhan sistem ini harus melakukan pembenahan agar prosedur kinerja yang diterapkan di masing-masing pemerintah daerah tidak dibatasi oleh banyak kekurangan sistem.

6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Masalah dan kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat terjadi dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan. Akibatnya, upaya untuk menerapkan kebijakan memerlukan lingkungan eksternal yang menguntungkan. Situasi sosial, politik, dan ekonomi berfungsi dengan baik dan berkembang sebagaimana mestinya di lingkungan BPPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meski telah terjadi pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam beberapa bulan terakhir, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap menjaga keselarasan dan kesepadanan kedudukan sosial, politik, dan ekonomi. Ini jelas sangat bagus, BPPD sebagai badan yang bertugas mengelola pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sangat peka terhadap disharmonisasi dalam keberlangsungan kegiatan, terutama yang dikuasai oleh rakyat. Kedamaian saat ini,

bagaimanapun, merupakan cerminan dari masyarakat di mana BPPD secara profesional menjalankan tanggung jawab pelayanan publiknya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun solusi peneliti untuk memecahkan persoalan yang terjadi dalam implementasi SIPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

- a. Perangkat keras yang digunakan oleh pelanggan harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga kecepatan entri data dapat lebih ditingkatkan.
- b. Memberikan pelatihan kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang digunakan dalam analisis data.
- c. Berkenaan dengan keragaman laporan, sistem harus diperluas secara berkala agar menghasilkan laporan yang lebih berdiferensiasi selaras dengan harapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna SIPD.
- d. Dalam hal keragaman laporan, sistem harus diperbarui secara berkala agar penyampaian laporan lebih beragam sesuai dengan keinginan pengguna SIPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. Meningkatkan perawatan dan pemeliharaan fasilitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

KESIMPULAN

Hasil penelitian penulis telah menghasilkan kesimpulan yaitu, diketahui bahwasanya implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum diterapkan secara optimal. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini tergolong aplikasi baru dan proses penerapannya tentu masih memiliki banyak kendala yang di dapatkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya yaitu pengadaan pelatihan dan Bimbingan Teknologi (Bimtek) yang masih minim mengakibatkan kualitas sumber daya manusia kurang memahami dalam mengoperasikan sistem informasi daerah, hal ini tentu menyebabkan penginputan dari tiap SKPD mengalami keterlambatan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses lewat www.sipd.kemendagri.go.id namun kendalanya harus menunggu persetujuan admin untuk dapat masuk melihat informasi pembangunan daerah. Pentingnya pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara cepat mendukung rencana pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, seperti sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Berbagai kekurangan dalam sistem ini tentu dapat teratasi dan diperbaiki seiring berjalannya waktu. Tentu saja, banyak pihak harus terlibat untuk memenuhi berbagai harapan agar aplikasi ini bisa sukses.

DAFTAR LITERATUR

- Hutahean, J. (2018). *Konsep Sistem Informasi*. Deepublish.
- Karundeng, Afrilia Bella, et, al. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Prafitasari, A. (2016). Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *JURNAL TRANSLITERA*.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No. 70 Tahun
2019 Tentang Sistem Implementasi Pemerintahan Daerah